

AHMAD ALI RIFAN, S.ST. Akt, M.E, M.S.E., M.Sc

ANALIS KEBIJAKAN PKAPBN BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Outline



VISI DAN TANTANGAN MENUJU INDONESIA MAJU

KOMITMEN INDONESIA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG TRANSISI ENERGI



MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU 2045 MEMBUTUHKAN TEROBOSAN KEBIJAKAN

Reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demografi

INDONESIA 2045

PROSPEK

DEMOGRAFI

309

Juta penduduk

Umur produktif

75% Hidup di perkotaan

Berpenghasilan menengah



ECONOMY

- Terbesar ke-4 di dunia
- Pendapatan per kapita: US\$29,300
- Struktur perekonomian yang lebih produktif
- Sektor jasa yang maju

PRASYARAT



Infrastruktur yang memadai



SDM Yang Berkualitas Tinggi



Kemampuan adopsi teknologi



Pembangunan daerah yang baik



Kebijakan Ekonomi yang baik

- -Resources (Sound Budget)
- -Macro Stability
- -Political Stability

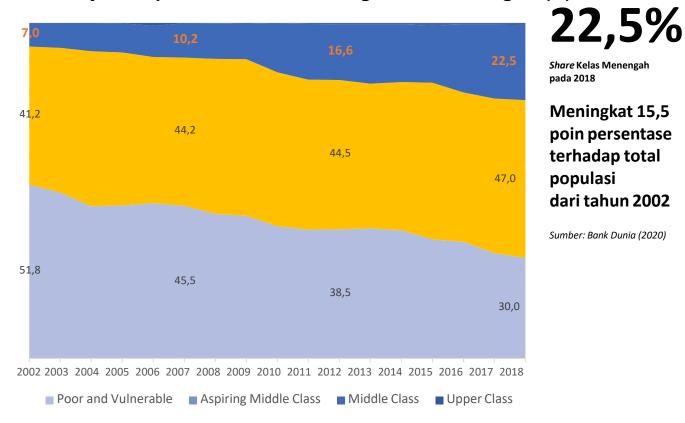
Sumber: estimasi Kemenkeu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FAKTOR DEMOGRAFI MENJADI PELUANG PEMBANGUNAN

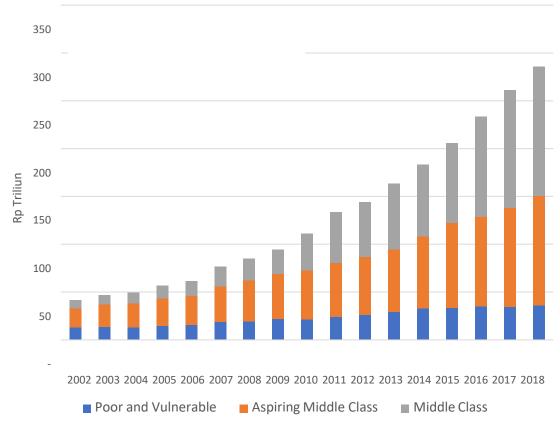
Pertumbuhan kelas menengah menjadi peluang memperkuat redistribusi pendapatan dan mewujudkan keadilan

Share jumlah penduduk kelas menengah terus meningkat (%)



Dengan melakukan **reformasi perpajakan yang tepat**, penerimaan negara akan meningkat signifikan seiring dengan tren demografi dan perubahan sosial-ekonomi penduduk

Konsumsi penduduk kelas menengah tumbuh tinggi (Rp T)



Pertumbuhan **Kelas Menengah** menjadi sumber peningkatan Penerimaan Pajak terutama dari **pajak konsumsi (PPN) dan PPh OP**



DI MASA BONUS DEMOGRAFI MENJADI MOMENTUM REFORMASI UNTUK PENGUATAN FONDASI DAN DAYA SAING

dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal



Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlinsos yang efektif untuk mendorong kualitas SDM

REFORMASI FISKAL

Reformasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja (*spending better*) & pembiayaan inovatif Melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur melalui infrastruktur digital dan efisiensi logistic, serta konektivitas



Reformasi Sektor Riil Omnibus Law Cipta Kerja



Deregulasi

enveder

Penyederhanaan Birokrasi Transformasi Ekonomi Reformasi Sektor Keuangan

- Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja
- Memudahkan Pembukaan Usaha Baru
- Mendukung Pemberantasan Korupsi
- Peningkatan ekosistem investasi
- · Perizinan berusaha
- Ketenagakerjaan
- Dukungan UMKM
- Kemudahan berusaha
- Riset & inovasi

- · Pengadaan tanah
- · Kawasan ekonomi
- Investasi pemerintah pusat & percepatan PSN
- Administrasi
 Pemerintahan
- Pengenaan Sanksi

- Pasar keuangan yang mendalam Depth •
- Sektor keuangan yang **dapat diakses** secara luas *Access* •
- Sistem keuangan yang efisien, kuat dan stabil Efficiency •

SEBELUM PANDEMI, PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM MOMENTUM PERTUMBUHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN Perekonomian relatif stabil, pembangunan infrastruktur massif, reformasi birokrasi berjalan, iklim investasi diperkuat

Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2015-19









Momentum Reformasi Terus berlanjut....

5 ARAHAN STRATEGIS PRESIDEN



Pembangunan SDM



Pembangunan Infrastruktur



Penyederhanaan Birokrasi



Penyederhanaan Regulasi



Transformasi Ekonomi

Sumber: Laporan 5 Tahun Jokowi-JK, Bloomberg as of October, Ministry of Finance, BPS



DIBUTUHKAN PENCIPTAAN SUMBER PERTUMBUHAN BARU PASCA PANDEMI

Implementasi agenda reformasi struktural sebagai katalis pertumbuhan ekonomi



Key Emerging Trends



Pola hidup new normal



perdagangan, investasi baru



Kesadaran ekonomi hiiau



Ketahanan energi dan pangan

- Kesadaran pola hidup sehat
- Lonjakan aplikasi teknologi digital
- Diversifikasi Supply Chain
- Inisiasi Regional Supply Chain
- Indonesia dalam strategic global supply chain
- Fragmentasi globalisasi
- Kebijakan progresif Net Zero Emission
- · Permintaan produk, investasi ramah lingkungan
- Positioning eskalasi geopolitik
- Fragmentasi dari globalisasi

Jasa kesehatan. farmasi dan alkes. ekonomi digital

Industri mesin. elektronik, alat komunikasi, kimia, hilirisasi mineral

Nilai ekonomi karbon. teknologi energi terbarukan

Transisi energi dan pengembangan EBT serta industri dan distribusi pertanian

Agenda Reformasi Struktural

Percepatan program prioritas **Pemerintah**

- Pembangunan SDM (Reformasi Pendidikan, Kesehatan, dan Perlinsos)
- Pembangunan infrastruktur
- Penyederhanaan regulasi
- · Penyederhanaan birokrasi

Agenda reformasi Pemerintah

Percepatan dan pangan

- Implementasi UU Cipta Kerja (INA & OSS berbasis risiko, dll)
- Reformasi Fiskal (UU HPP & UU HKPD)
- Reformasi Logistik (LNSW)
- Reformasi Sektor Keuangan
- Reformasi Perencanaan Penganggaran (mohon persetujuan izin prakarsa untuk revisi PP 90/2010)
- kemandirian energi
- Pembangunan infrastruktur energi dan pangan
- Dukungan kebijakan fiskal
- · Perbaikan rantai pasok global

PEMANFAATAN PELUANG KEY EMERGING TRENDS DAN REFORMASI STRUKTURAL UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI



Akselerasi Adopsi Teknologi Informasi dan Digital



Revitalisasi industri bernilai tambah tinggi



Pembangunan ekonomi hijau dan penguatan EBT





ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2023 UNTUK MENDORONG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

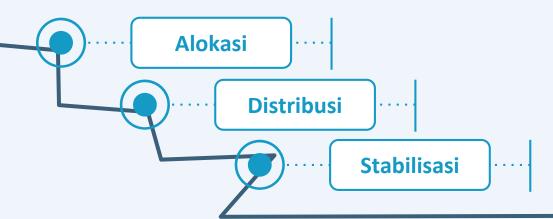


KUALITAS SDM

INFRASTRUKTUR

REFORMASI BIROKRASI REVITALISASI INDUSTRI EKONOMI HIJAU





Penguatan Peran APBN Sesuai Fungsi Dasarnya

(pasal 3 ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003)

Konsolidasi Fiskal Berkualitas (amanat UU 2/2020)

MOBILISASI PENDAPATAN

- Efektivitas UU HPP (tax ratio naik);
- Optimalisasi PNBP melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif

SPENDING BETTER

- Efisien dan Produktif
- Fokus untuk *human capital, physical capital,* institutional reform, adaptasi dimasa endemi
- Antisipasi uncertainty

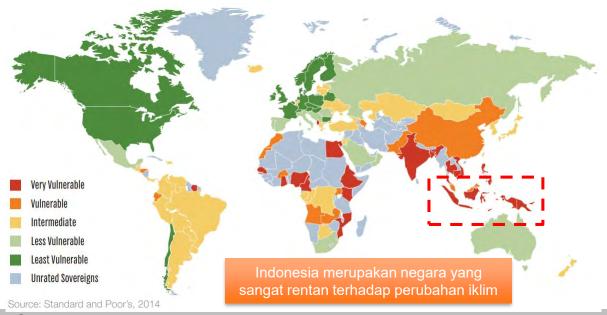
PEMBIAYAAN INOVATIF & SUSTAINABLE

- Pengendalian risiko utang
- Meningkatkan peran Swasta, BUMN, BLU, SWF, SMV (Pembiayaan inovatif)



Indonesia Rentan Terhadap Dampak Perubahan Iklim





Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki >17.000 pulau dan rentan akan risiko perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut

Dari tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0.03 °C per tahun

Sumber: BMKG (2020)

Dari tahun 2010-2018, emisi GRK nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per tahun.

Sumber Data: KLHK (2020), data diolah

Indonesia mengalami kenaikan permukaan laut 0,8-1,2 cm/tahun, sementara sekitar 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir

Sumber: Bappenas (2021)

RISIKO DARI PERUBAHAN IKLIM



KELANGKAAN AIR

Meningkatnya tingkat banjir dan kekeringan yang parah akan memperparah kelangkaan air bersih.



PENURUNAN KUALITAS KESEHATAN

Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor dan kematian akibat tenggelam. Kenaikan suhu dapat menyebabkan kematian akibat serangan panas.



KERUSAKAN EKOSISTEM LAHAN

Secara ilmiah diprediksi bahwa kebakaran hutan yang parah akan sangat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan Biomasa.



KELANGKAAN PANGAN

Perubahan produksi bioma dan ekosistem dapat menyebabkan kelangkaan pangan bagi semua makhluk.

Perubahan Iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang saat ini mencapai

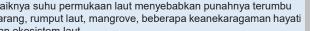
yang terjadi di Indonesia. Sumber: NDC, 2016

Potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66% s.d. 3,45% PDB pada tahun 2030

Sumber: Roadmap NDC Adaptasi, 2020

KERUSAKAN EKOSISTEM LAUTAN

Naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangroye, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut.

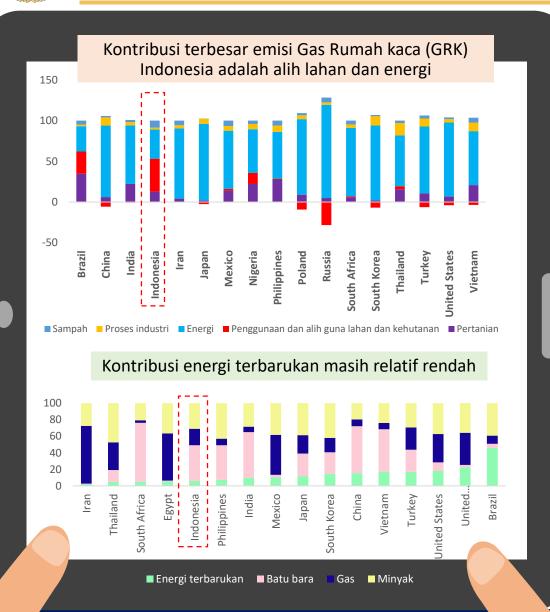




PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU JUGA MEMPUNYAI NILAI STRATEGIS DALAM KEBIJAKAN FISKAL



Komitmen pemerintah untuk mendukung pencapaian target NDC dan memanfaatkan peluang ekonomi hijau



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU



5. Optimalisasi kerja sama internasional dalam rangka penurunan emisi GRK



Mendorong
 pengembangan industri
 berbasis baterai
 (elektronik dan otomotif)



4. Meningkatkan mobilisasi pembiayaan ekonomi hijau (domestik dan internasional)



 Mendorong pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK): pasar karbon, pajak karbon dan pembayaran berbasis kinerja



2. Meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional

EXPECTED OUTCOME

- Pencapaian **Target NDC 2030 (29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan kontribusi internasional) dan NZE 2060** secara adil dan terjangkau.
- Pencapaian target EBT 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025
- **Early Retirement PLTU** melalui ETM, EBT Skala Besar, peningkatan interkoneksi, serta penciptaan klaster Industri Hijau.

Komitmen Pemerintah untuk mengatasi dampak perubahan iklim telah dirumuskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC)



Nationally Determined Contribution (NDC)

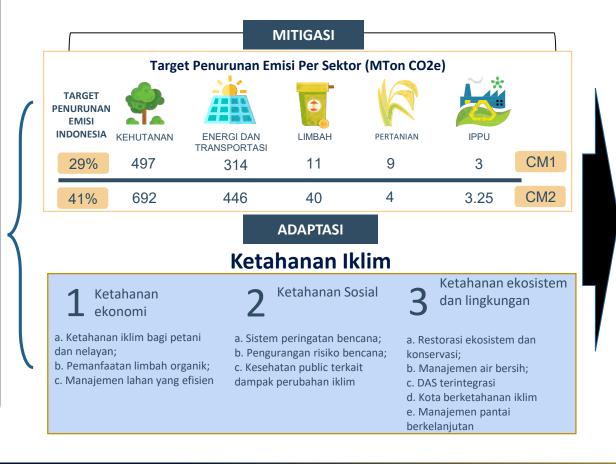
Merupakan komitmen nasional untuk berkontribusi pada penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (*Paris* Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change).

Tujuan:

- a. mendukung penurunan emisi gas rumah kaca global sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan kerjasama internasional pada tahun 2030 dari skenario business as usual
- b. meningkatkan ketahanan iklim nasional
- c. menuju masa depan Indonesia yang rendah emisi GRK dan berketahanan iklim

First NDC ditetapkan pada tahun 2016 dan telah diperbaharui melalui Updated NDC (2021)

AGENDA PERUBAHAN IKLIM INDONESIA



Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2060

Mandat dari:

- Paris Agreement Article. 4.19
- Menjadi pedoman pencapaian NDC ke depannya;

Skenario LCCP:

- Net-Sink sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan di tahun 2030;
- Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat

Menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat

STRATEGI PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM NASIONAL



Dukungan pendanaan untuk mencapai target agenda iklim dapat berasal dari sektor publik, swasta dan internasional menuju "a just and affordable transition"





NDC

NZE

SUMBER PENDANAAN

DOMESTIK

APBN

- Belanja Pemerintah **Pusat**
- Belanja TKDD
- Pajak/Cukai Karbon
- Pembiayaan (Green Sukuk, SDGs Bond)

NON-APBN

- Badan Usaha Swasta
- Perdagangan Karbon
- APBD
- Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan dan IKNB)

- Pasar Modal
- BUMN
- Filantropi

BILATERAL

INTERNASIONAL

- Pemerintah negara lain
- Swasta dari negara lain

· Green Climate Fund

MULTILATERAL

- Global Environment Facility
- Adaptation Fund
- MDBs/IFIs

TANTANGAN KE DEPAN



Keterbatasan ruang fiskal. Penguatan agenda reformasi fiskal dan konsolidasi fiskal akan menjadi kunci keberlanjutan fiskal ke depan.



Mobilisasi sumber pendanaan perubahan iklim non-APBN secara optimal, baik domestik maupun internasional.



Pemulihan ekonomi diiringi dengan upaya transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan terjangkau.



Memperkuat kelayakan proyek-proyek hijau nasional agar mampu dibiayai sektor keuangan dan mendapat dukungan internasional



Mekanisme pasar saat ini belum mampu merefleksikan perbedaan harga dari sektor Green dan non-Green. Saat ini masih sebatas *Financing Green*, perlu penguatan untuk *Greening the Finance* demi mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

BPDLH, SDG INDONESIA ONE, ICCTF



PETA JALAN SEKTOR ENERGI DAN TRANSPORTASI MENUJU NETT ZERO EMISSION



- 1) Timeline rencana strategis untuk mencapai Net Zero Emission di sektor energi
- 2) Roadmap ini akan menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060

2021-2025



2026 -2030



2031 -2035



2025

198 juta ton pengurangan emisi CO2

Supply:

- Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap 3,6 GW
- 2) Pembangunan PLTU 10,6 GW
- 3) Gasifikasi pabrik gas 1,7 GW
- 4) Retirement PLTU batu bara sebesar 8,8 GW
- 5) Konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ke pembangkit listrik EBT
- PLTGU 0,8 GW sebagai pengganti PLTU batubara

Demand:

- Penurunan impor LPG dengan kompor induksi menjadi 8,2 juta KK
- 2. Kendaraan listrik 400 ribu mobil dan 1,7 juta sepeda motor
- 3. Jaringan gas untuk 5,2 juta rumah
- 4. BBG 100 ribu mobil
- 5. Penerapan Manajemen Energi

2030

314 juta ton pengurangan emisi CO2

Supply:

Pembangunan Pembangkit EBT 10,3 GW pengganti PLTU

Demand:

- 1) Penurunan impor LPG dengan kompor induksi menjadi 18,2 juta KK
- Kendaraan listrik 2 juta mobil dan 13 juta sepeda motor
- 3) Jaringan gas untuk 10 juta rumah
- 4) BBG 300 ribu mobil
- 5) Pemanfaatan DME untuk 20,4 juta KK
- 6) Penerapan Manajemen Energi dan SKEM

2035

475 juta ton pengurangan emisi CO2

Supply:

- 1) Tidak ada pembangkit fosil tambahan.
- Tidak ada lagi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.
- 3) PLTU Batubara Pensiun 6 GW*)
- 4) Pembangunan pembangkit listrik EBT:PLTS 99 GW, PLTA 3.1 GW, Bioenergi 3.1 3)GW dan PLTP 5.6 GW
- Pemanfaatan Hidrogen 328
 MWPenggunaan Baterai 7 GW

Demand:

- 1) Kompor induksi untuk 28,2 juta HH
- Kendaraan listrik 5,7
 juta mobil dan 46,3 juta
 sepeda motor
- 3) Jaringan gas untuk 15,3 juta rumahBBG 800 ribu mobil

2051-2060



2041 -2050



2036 -2040

2060

1.526 juta ton pengurangan emisi CO2

Supply:

- 1) Pensiun PLTU Batubara 8 GW*)
- 2) Pensiun PLTGU 8 GW
- 3) Pembangunan PLTU: 8,2 GW, PLTB 11,6 GW, PLTA 37,9 GW, Bioenergi 2.1 GW, PLTP 3) 3 GW, PLTAL 12.1 GW, dan Nuklir 30 GW
- 4) Pemanfaatan Hidrogen 52 GW
- 5) Pemakaian Baterai 140 GW

Demand:

- 1) Kompor induksi 58 juta HH
- Kendaraan listrik 69,6 juta mobil dan 229 juta sepeda motor
- Jaringan gas untuk 23,9 juta rumah

2050

956 juta ton pengurangan emisi CO2

Supply:

- 1) Pensiun PLTU Batubara 31 GW *)
- 2) Pembangunan PLTU: PLTS 180,2 GW, PLTB 17,5 GW, PLTA 13,7 GW, Bioenergi 23 GW, PLTP 3 GW, PLTAL 1,3 GW dan Nuklir 5 GW
- 3) Hidrogen 9 GW
- 4) Pemakain Baterai 151 GW

Demand:

- 1) Kompor induksi untuk 48,2 juta HH
- 2) Kendaraan listrik 38,2 juta mobil dan 205 juta sepeda motor
- Jaringan gas untuk
 23,4 juta rumah
- 4) Mobil BBG 2,8 juta

2040

796 juta ton pengurangan emisi CO2

Supply:

- Pensiun PLTU Batubara 3 GW*)
- 2) Pembangunan pembangkit EBT: PLTS 68,5 GW, PLTB 9,4 GW, Hidro 3,7 GW, Bioenergi 7,8 GW, dan PLTP 1 GW
- 3) Pemanfaatan Hidrogen 332 MWBaterai 46 GW

Demand:

- 1) Kompor induksi untuk 38,2 juta HH
- Kendaraan listrik 12,3 juta mobil dan 105 juta sepeda motor
- 3) Jaringan gas untuk 20,3 juta rumah
- 4) BBG 2 juta mobil

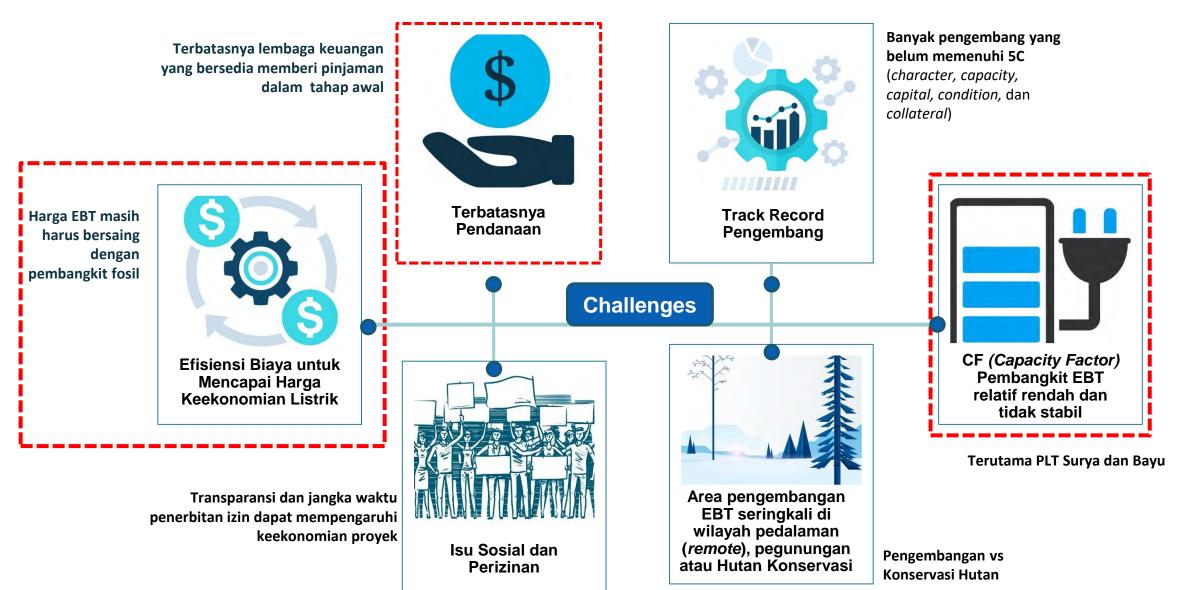
Source: MEMR, 2022

Teknologi rendah emisi yang inovatif seperti CCS/CCUS dapat diterapkan dalam kondisi tertentu ke pembangkit listrik fosil untuk mempercepat pengurangan emisi menuju transisi ke energi yang lebih bersih dan lebih hijau.

TANTANGAN PENGEMBANGAN EBT SECARA UMUM



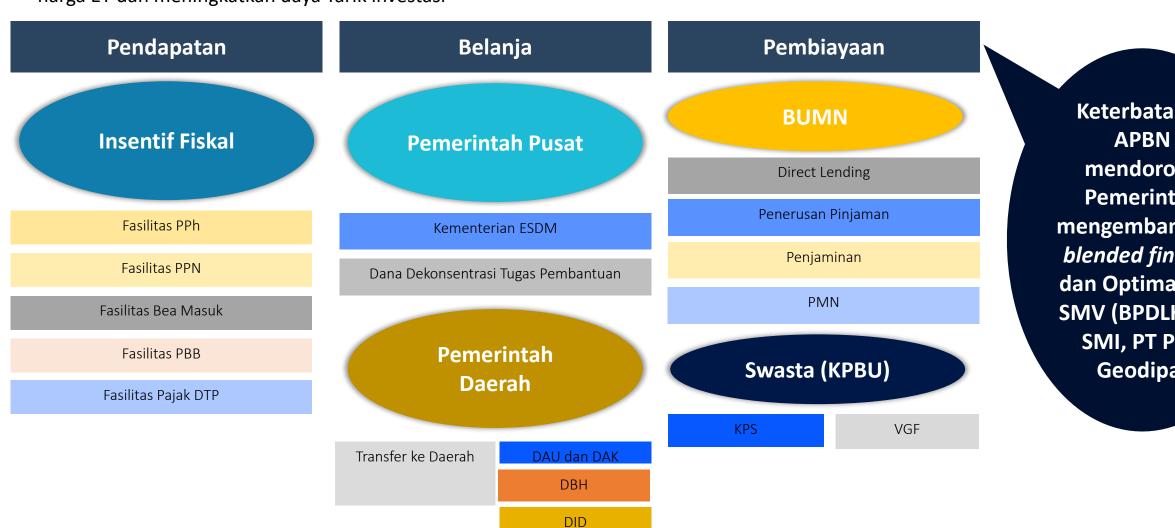
Terbatasnya pendanaan dan tingginya harga EBT menjadi tantangan terbesar, perlu strategi komprehensif dari seluruh stakeholder



DUKUNGAN FISKAL MELALUI APBN



Terdapat beberapa skema insentif fiskal untuk pengembangan EBT, yang diharapkan dapat menurunkan harga ET dan meningkatkan daya Tarik investasi



Keterbatasan mendorong Pemerintah mengembangkan blended finance dan Optimalisasi SMV (BPDLH, PT. SMI, PT PTT, Geodipa)

INSENTIF PERPAJAKAN EXISTING UNTUK PENGEMBANGAN EBT



Insentif perpajakan untuk sektor ketenagalistrikan sudah cukup komprehensif

No	Fasilitas	Dasar Hukum	Bentuk Fasilitas	EBT Penerima Manfaat
1.	Tax Holiday	PMK 130/2020	Pengurangan PPh sampai dengan 100%	Termasuk pembangkit listrik EBT
2.	Tax allowance (PPh)	PP 78/2019 PMK 21/2010	 Pengurangan penghasilan neto 30% dari investasi Penyusutan/amortisasi dipercepat PPh dividen 10% kepada WPLN Kompensasi kerugian 5 s.d. 10 tahun 	panas bumi, air, surya, angin, arus laut, dan industri bioenergy
3.	PPh DTP	PMK 179/2013	Subsidi Pajak DTP	Panas Bumi
4.	Pengecualian Pemungutan PPh 22 Impor	PMK 21/2010PMK 34/2017	 Dikecualikan dari Pemungutan PPh 22 Impor Impor Barang untuk kegiatan usaha panas bumi 	Kegiatan pemanfaatan sumber ETPanas Bumi
5.	Pengurangan PBB	PMK 172/2016	Pengurangan PBB pada tahap eksplorasi	Panas Bumi
6.	Fasilitas PPN Impor dibebaskan	PP 81/2015 PMK 21/2010	Pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP strategis	Energi terbarukan
7.	PPN dan PPnBm Impor tidak dipungut	PMK 198/2019	PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut & Bea Masuk Dibebaskan	Ekplorasi dan eksploitasi panas bumi
8.	Pembebasan Bea Masuk atas Impor	 PMK 21/2010 PMK 218/2019 PMK 154 2018 stdtd PMK 154 2012 	 Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk usaha panas bumi Pembebasan bea masuk atas impor barang modal untuk industri pembangkit listrik 	Panas bumiPembangkit listrik

SKEMA PENDANAAN KREATIF NON-APBN



Keterbatasan APBN mendorong Pemerintah untuk mengembangkan blended finance untuk memperkuat skema pembiayaan dengan menampung dana dari donor internasional untuk kegiatan pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim



Green Sukuk adalah instrumen untuk membiayai program pemerintah terkait aksi perubahan iklim, termasuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Data Climate Budget Tagging menjadi referensi dalam penerbitan Green Sukuk.



Platform blended finance yang dikelola oleh PT. SMI memfasilitasi keterlibatan filantropis, donor, dana iklim, investor hijau, MDB, lembaga internasional, bank komersial, dana kekayaan negara, investor institusional.

Blended Finance pada proyek Panas Bumi PISP, GEUDP, & GREM:
Menggabungkan dana APBN
dengan sumber pembiayaan
non-APBN untuk mendukung
pengembangan Panas Bumi
melalui skema de-risking pada
tahap eksplorasi.

Environment Pooling Fund (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup - BPDLH)

Badan ini bertujuan untuk memobilisasi dana publik dan swasta untuk secara efektif mendukung program perlindungan lingkungan hidup termasuk perubahan iklim

Green Climate Fund

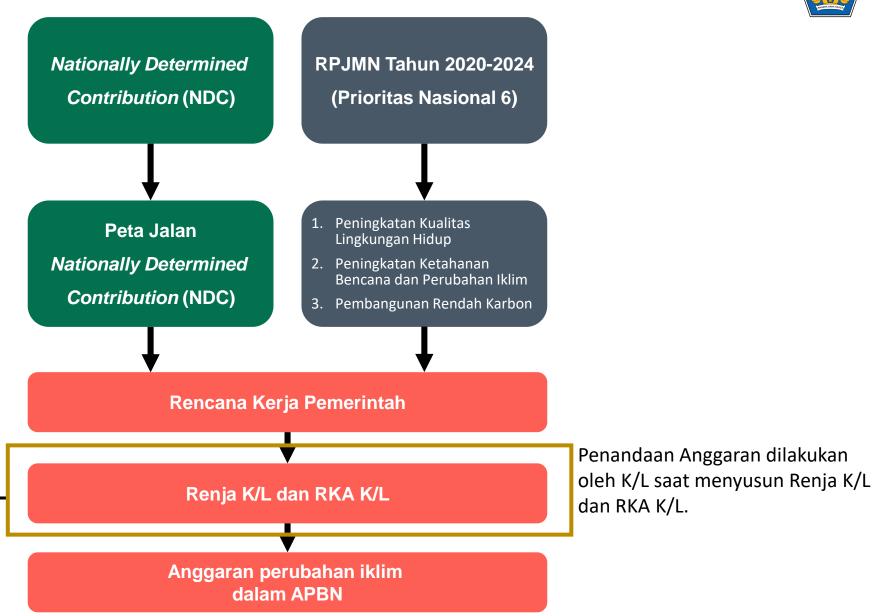
4. INISIATIF PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM



Peran Pemerintah dalam Menangani Isu Perubahan Iklim

NDC dan RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun kegiatan dan proyek prioritas terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Climate Budget Tagging
merupakan alat bantu bagi
Pemerintah Indonesia untuk
menelusuri output dan anggaran
mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim di Pemerintah Pusat.





OVERVIEW SEKTOR BATUBARA & MINERAL LOGAM DI INDONESIA

Hasil produksi sebagian besar diekspor, industri hilir masih relatif dangkal

Ilustrasi Sumbangan Nilai Tambah Sektor Minerba

Pertambangan Minerba (2,68%)* Pertambangan Bijih Logam (0,85%) Pertambangan Batubara logam industrial logam mulia ■ Bijih Tembaga ■ Bijih Emas (0,20%)** Batubara & Lignit (0.33%)**■ Bijih Perak (0,01%)** (1,83%)*■ Bijih Timah (0,05%)** ■ Bijih Nikel (0,05%)** ■ Bijih Bauksit (0,01%)** ■ Pasir-Bijih Besi (0,01%)**

Industri Berbasis Output Minerba

Penyediaan Energi

Industri Briket Batubara (0,02%)*Listrik (0,98%)* Industri Logam Dasar (0,78%)*

- Ind. Besi & Baja Dasar (0,20)**
- Ind. Logam dasar bukan besi (0,32%)**

Industri Barang Logam (1,63%)*

Bahan bangunan dari logam (0,24)**

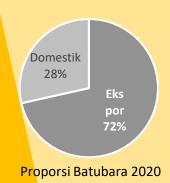
Industri Perhiasan (0,19%)**

Industri turunan & Jasa lainnya

Ket: Angka dalam kurung merupakan estimasi kontribusi thd PDB 2020 *berdasarkan realisasi PDB tahun 2020, **estimasi berdasarkan Tabel Input-Output 2016

Output utama Minerba Mayoritas Untuk Pasar Ekspor

Output utama Pertambangan Minerba



Batubara merupakan komoditas ekspor utama.72% Output di-ekspor, sisanya digunakan sebagai sumber energi PLTU & industri briket

Nilai ekspor Batubara 2020: **\$14,5 Milyar** (14,5% ekspor nasional)

Tembaga (Konsentrat)

mayoritas diproduksi oleh tambang di Papua (PT Freeport). Sebagian besar diekspor mentah. Sebagian lainnya diolah menjadi katoda tembaga

Nlai ekspor konsentrat tembaga

Timah diolah menjadi ingot (timah

\$1,1 Milyar (0,7% ekspor nasional)

Emas & Perak, hasil tambang

murni batangan) yang 96% diekspor

Nilai Ekspor Timah 2020:

2020: **\$2,4 Milyar** (1,5% ekspor nasional 2020)



Proporsi Bijih Tembaga Berd. Tabel IO 2016

Output utama Industri Berbasis Minerba

Nikel Hasil produksi diolah smelter di Sulawesi & Malut mengasilkan feronikel, Nickel Pig Iron, & Nickel Matte.

Merupakan produk potensial untuk pengembangan industri baterai



Nilai Ekspor 2020

- **Feronikel**: **\$4,74 Milyar** (2,9% ekspor nasional)
- Produk Nikel: \$808 Juta (0,5% ekspor nasional)

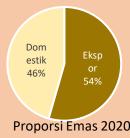
Nilai Ekspor Logam Mulia 2020:

sebagian besar diolah di industri

perhiasan

\$6,7 Milyar (4,1% ekspor nasional)





Sumber Data: BPS, Kementerian ESDM (diolah)

KONTRIBUSI & KINERJA SEKTOR BATUBARA & MINERAL LOGAM UTAMA

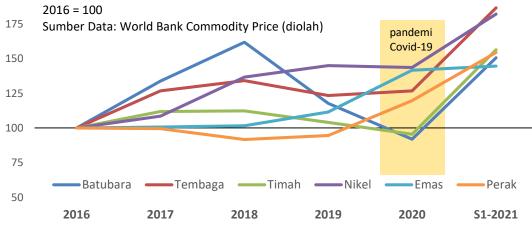
Sangat sensitif terhadap pergerakan harga komoditas global

Kontribusi Minerba (% thd PDB)

Sumber: BPS (diolah)

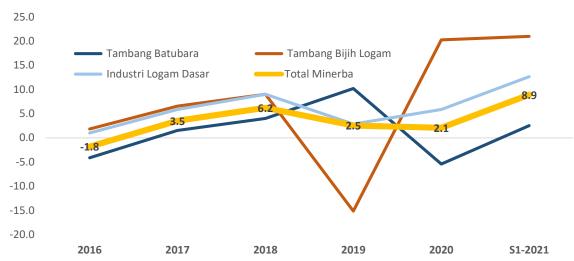


Indeks Harga Komoditas Minerba



Pertumbuhan Riil Sektor Minerba (% YoY)

Sumber: BPS (diolah)



- Kontribusi sektor Minerba terhadap Perekonomian terutama tercermin pada subsektor: Pertambangan Batubara, Pertambangan Bijih Logam, & Industri Logam Dasar dengan Batubara dan Bijih Tembaga sebagai komoditas kontributor utama
- Kinerja dan kontribusi sektor minerba menunjukkan fluktuasi & sangat sensitif terhadap dinamika permintaan & harga komoditas global karena mayoritas outputnya untuk memenuhi pasar ekspor
- Kontribusi di tahun 2020 menurun tajam akibat permintaan global yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Di paruh pertama 2021, permintaan dan harga meningkat tajam, sehingga meningkatkan kontribusi sektor ini (kontribusi & kinerja pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012)

REGULASI DOMESTIC MARKET OBLIGATION (DMO) DALAM UU MINERBA

UU No.3/2020 Tentang Perubahan UU
4/2009 Tentang Minerba

Pasal 5:

- Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan DPR RI menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Minerba untuk kepentingan dalam negeri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan minerba untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, penjualan, serta harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan PP.

PP No.96/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba

Pasal 157 ayat (1):

 Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengutamakan kebutuhan Minerba untuk kepentingan dalam negeri.

Pasal 158 ayat (3)

 Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas Batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri.

Pasal 160:

- Ayat (1), Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Minerba untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Menteri dapat menetapkan harga jual Minerba.
- Ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual Minerba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

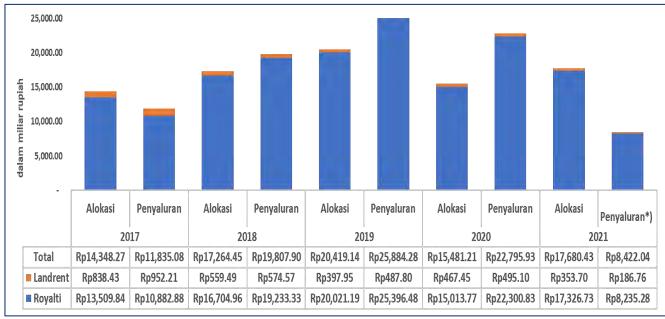
PENGATURAN DAN PERKEMBANGAN ALOKASI DBH MINERBA

DBH Minerba terdiri dari *landrent* dan royalty, realisasinya bergantung pada realisasi PNBP Minerba. Tahun 2020 disalurkan Rp22,79 T dan tahun 2021 dialokasikan Rp17,68 T.

Persentase Pembagian Dana Bagi Hasil

	PP 55/2005			
Jenis Penerimaan	Pusat	Prov.	K/K	Pemerataan K/K Lain
Pertambangan Umum				
a. luran Tetap (Land-rent)	20	16	64	19
b. Royalti	20	16	32	32

Perkembangan Alokasi Dana DBH Minerba



^{*)} Penyaluran DBH Minerba TA 2021 merupakan realisasi per 27 Juli 2021

TANTANGAN UTAMA DANA BAGI HASIL (DBH)

Realisasi DBH Minerba bergantung pada realisasi PNBP Minerba yang dipengaruhi oleh harga komoditas, volume produksi, kurs serta kebijakan pemerintah.



Potensi adanya konflik wilayah daerah penghasil pada Wilayah Kerja yang berbatasan antar satu Kab.Kota.



Potensi kerusakan wilayah atau eksternalitas negative bagi daerah penghasil serta daerah di sekitarnya.



Ketergantungan APBD daerah penghasil, terutama pemerintah kabupaten/kota terhadap DBH MInerba



KESIMPULAN

- 1. Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju 2045 diperlukan terobosan kebijakan. Reformasi struktural yang didukung oleh reformasi fiscal menjadi strategi penting. Pembangunan ekonomi hijau juga mempunyai nilai strategis untuk mencapai visi tersebut.
- 2. Sejalan dengan pembangunan ekonomi hijau, Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
- 3. Pengembangan EBT dan meningkatkan porsi bauran EBT dalam energy mix nasional. Terdapat beberapa skema insentif fiskal untuk pengembangan EBT, yang diharapkan dapat menurunkan harga ET dan meningkatkan daya Tarik investasi. EBT berperan penting dalam upaya reduksi emisi CO2e dan pencapaian target NZE sebelum 2060.
- **4. Melalui pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim** yang menjadi bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mendukung transisi energi dan mitigasi perubahan iklim.
- 5. Kebijakan fiskal untuk mendukung transisi energi menuju nze disusun dengan tetap memperhatikan prinsiprinsip pengelolaan keuangan negara (good governance) dan kesinambungan fiskal (efficient and at affordable cost).

Terima Kasih



BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI PUSAT KEBIJAKAN APBN AHMAD ALI RIFAN, S.ST. Akt, M.E, M.S.E., M.Sc

Alamat

Gedung R. M. Notohamiprodjo Lantai 6 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat

Telepon & Fax

Internal: 7141

Eksternal: (021) 3441448

Fax : (021) 3866119

E-mail: aarifan@kemenkeu.go.id



